

Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus

Adibussholeh HM

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
adibussolebiait21@gmail.com

Siti Wahyuni

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
sitiwahyuni@gmail.com

Abstract

The education process of children with special education is not like implementing education in "normal" children. They must get treatment with special skills for teachers and stakeholders involved in the implementation of education. This study uses a qualitative approach. This study showed that the curriculum model applied is adjusted to the initial assessment and learning development results, including duplication, modification, substitution, and most models.

Keywords: *Inclusive Education; Children with Disabilities*

Abstrak

Proses pendidikan anak berkebutuahn khusus (ABK) tidak seperti penyelenggaraan pendidikan pada anak-anak "normal". Mereka harus mendapatkan penanganan dengan keahlian khusus bagi guru-guru dan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model kurikulum yang diterapkan disesuaikan dengan hasil asesmen awal dan perkembangan pembelajaran, meliputi model duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif; Anak Berkebutuhan Khusus.*

Pendahuluan

Pendidikan inklusif telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan inklusif didasari oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Strategi, metode atau cara

mengimplementasikan pendidikan inklusif di masing-masing negara sangat bervariasi.¹

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak semuanya kehilangan kesempatan untuk berprestasi di bidang pendidikan. Banyak dari mereka menghasilkan eksplorasi keahlian-keahlian khusus melebihi anak normal. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tidak banyak dikuasai oleh anak-anak normal. Kekurangsempurnaan justru memberi inspirasi bahwa siapa saja, dalam kondisi apapun, jika punya niat sungguh-sungguh untuk berkarya, pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Inklusi adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial dimana semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Di dalam lingkungan inklusif, semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau potensi kecerdasan dan atau bakat yang istimewa memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.²

Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu penegakan hak asasi manusia. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa kebijakan pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.³ Secara formal pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama.

Kebutuhan terhadap sekolah inklusif di Indonesia saat ini belum sebanding dengan ketersediaan sekolah reguler yang bisa menampung anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan data tahun 2011, jumlah anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas di Indonesia 356.192 anak. Namun, hanya 85.645 anak yang telah memperoleh layanan pendidikan di sekitar 1.600 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia. Jumlah sekolah reguler yang telah menerapkan inklusif di Indonesia tingkat SD hanya berjumlah 548, tingkat SMP berjumlah 52, dan SMA berjumlah 40 sekolah. Terbatasnya sekolah inklusif disebabkan banyak sekolah-sekolah reguler yang belum mengembangkan layanan lembaga pendidikan ke arah inklusif.⁴

Di wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2012, tercatat hanya 473 ABK yang terserap dalam pendidikan di 17 SLB dengan tenaga 91 orang guru di wilayah

¹ Sue Stubbs. *Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*. Bandung: UPI Press. 2002. Hal.17.

² Kemendikbud. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Ppk-Lk Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2011. Hal. 15.

³ Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif*.

⁴ Kompas.com. 90 Sekolah Inklusif Peroleh Bantuan. Sumber: <http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/30/10380538>. Diakses Tanggal: 26 Juli 2015.

tersebut. Penyerapan sejumlah itu hanya meliputi 5 wilayah kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Artinya masih ada ABK yang tersebar di 15 kecamatan lainnya yang belum terserap dalam pendidikan formal. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Dikpora Daerah menerapkan sistem pendidikan inklusif yang diatur oleh Peraturan Bupati Nganjuk No.33 tahun 2012 dan diturunkan melalui SK Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk No. 421.1/086.6/411.201.3/2012. Saat ini sudah terdapat 11 sekolah reguler mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Kabupaten Nganjuk yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pendidikan inklusif.⁵

Kebutuhan sekolah inklusif sangat diperlukan para ABK, sebab tidak semua ABK harus dimasukkan ke SLB. Pendidikan SLB lebih cocok bagi ABK yang berat, sedangkan sekolah inklusif ini lebih tepat untuk ABK yang sedang dan ringan. Dengan bersatunya anak yang normal dan ABK, diharapkan bukan hanya hak belajar saja yang terpenuhi. Lebih dari itu, para siswa dapat belajar saling menghargai dan memahami satu sama lain. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka anak-anak dengan kebutuhan khusus berhak mendapat layanan fasilitas umum termasuk pendidikan tanpa diskriminasi. Persiapan kompetensi guru sangat diperlukan untuk menyambut langkah besar tersebut, baik guru wali kelas, guru mata pelajaran, maupun guru pendidikan khusus.

Berdasarkan keterangan Kepala SDN Werungotok 2 Kecamatan Nganjuk yang sejak tahun 2012 telah menerapkan pendidikan inklusif, diperoleh keterangan permasalahan yang dihadapi adalah ketidakjelasan peraturan yang mengatur hal-hal teknis, sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi oleh para guru mata pelajaran dalam menerapkan pendidikan inklusif. Kendala lain adalah kurangnya penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga guru tidak memiliki bekal yang memadai dalam menerapkan pendidikan inklusif. Minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk sekolah inklusif juga menjadi penyebab terbatasnya fasilitas pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut agar pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dapat berlangsung secara optimal.

Metode

Penelitian ini disesuaikan permasalahan di atas, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus⁶ di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Nganjuk Pace selama Bulan Juli - September 2019. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Setelah data-data terkumpul, peneliti melakukan analisis data

⁵ Ibnu Hajar. *Pendidikan Inklusif: Sebuah Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus*. Diklat Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Nganjuk. Tanggal 17-21 Februari 2015.

⁶ Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. Edisi-4. Sage Publication. 2009. h. 2.

mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola.⁷

Hasil Penelitian

Pelaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah umum di Kabupaten Nganjuk saat ini telah melibatkan sebanyak 10 sekolah. Secara khusus dalam penelitian ini hanya dibatasi observasi pada 3 sekolah umum yaitu: SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk, dan MIN Cangkring Kecamatan Pace. Landasan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Nganjuk adalah berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal *Pendidikan Inklusif*. Kemendikbud RI yang ditindaklanjuti dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.⁸ Cakupan peraturan tersebut meliputi beberapa aspek penting, yaitu: peserta didik, kurikulum, ketenagaan, dan kegiatan pembelajaran.⁹

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa kategori ABK di SDN Wilangan 1 Kecamatan Wilangan didominasi oleh ABK lambat belajar (tunagrahita ringan), yaitu sebanyak 15 siswa. Kategori ABK di SDN Werungotok 2 Kecamatan Nganjuk didominasi oleh ABK dengan kesulitan belajar, yaitu sebanyak 12 siswa. Kategori ABK di MIN Cangkring Kecamatan Pace didominasi oleh ABK dengan kesulitan belajar, yaitu sebanyak 11 siswa. Dengan demikian secara umum kriteria ABK peserta pendidikan inklusif di Kabupaten Nganjuk berdasarkan kategorinya didominasi oleh ABK lambat belajar dan kesulitan belajar.

Pembahasan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam meningkatkan pengetahuan ABK (anak berkebutuhan khusus) di Kabupaten Nganjuk dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek yaitu:

Kategori Peserta Didik ABK

Menurut Permendiknas No 70 Tahun 2009, peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas peserta didik yang dikategorikan “normal/biasa” dan peserta didik berkebutuhan khusus, antara lain: tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif

⁷ Robert K. Yin, h. 12.

⁸ Hajar, Ibnu. (2015). Pendidikan Inklusif: Sebuah Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus. Disampaikan pada Diklat Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Nganjuk. Tanggal 17-21 Februari 2015.

⁹ Kemendikbud. (2003). Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif. Kemendikbud RI.

lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.¹⁰

Kategori peserta didik ABK yang dominan di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan adalah ABK lambat belajar (tunagrahita ringan), yaitu sebanyak 15 siswa. Anak tunagrahita adalah kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata yang ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.¹¹ Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal. ABK tunagrahita kategori ringan yang memiliki IQ 55 - 70 masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Pada usia 16 tahun atau lebih mereka dapat mempelajari bahan yang tingkat kesukarannya sama dengan kelas 3 dan kelas 5 SD. Sesudah dewasa banyak di antara mereka yang mampu berdiri sendiri. Pada usia dewasa kecerdasannya mencapai tingkat usia anak normal 9 dan 12 tahun. Oleh sebab itu anak tunagrahita ringan dapat dilibatkan dalam sekolah inklusi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kategori ABK yang dominan di SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk adalah ABK dengan kesulitan belajar, yaitu sebanyak 12 siswa. Kategori ABK yang dominan di MIN Cangkring Kecamatan Pace adalah ABK dengan kesulitan belajar, yaitu sebanyak 11 siswa. Anak dengan kesulitan belajar merupakan kondisi dimana anak mengalami gangguan persepsi dalam berhitung, membaca, berbahasa dan menulis. Anak dengan kesulitan belajar juga kesulitan orientasi ruang dan arah, misalnya sulit membedakan kiri-kanan, atas-bawah. Tanda-tanda umum biasanya ABK tidak lancar atau ragu-ragu dalam membaca, membaca tanpa irama (monoton), kesulitan mengeja, tulisan sangat jelek, terbalik-balik, sering menghilangkan atau menambah huruf, dan kesulitan memahami simbol matematika.

Jika dilihat dari segi jumlah, tampak bahwa jumlah ABK tiap sekolah inklusif terlalu banyak. Selain itu jenis kategori ABK yang ada juga masih terlalu banyak ragamnya untuk ditangani oleh satu sekolah inklusif. Walaupun tidak ada ketentuan baku tentang persentase jumlah siswa reguler dan ABK dalam suatu sekolah, namun pada umumnya dalam pelatihan PPI direkomendasikan bahwa dalam satu kelas inklusif sebaiknya hanya ada 1 ABK saja. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena seorang ABK memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap guru pengajar, sehingga guru dituntut memberikan banyak perhatian terhadap ABK selama proses belajar mengajar di kelas berlangsung. Jika dalam satu kelas jumlah ABK lebih dari 1 siswa, maka beban guru dalam memberikan bimbingan menjadi terlalu berat, sehingga perhatian guru menjadi kurang maksimal, baik dalam mengajar siswa reguler maupun

¹⁰ Abdurrahman, Mulyono, *Pendidikan Bagi Anak Bangsa Berkesulitan Belajar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) h. 76

¹¹ Ainscow, Mand Booth, T. *Index for Inclusion Developing Learning and Participation in Schools*. Hobboken: CSIE Mark Vaughan. 2002, h. 678

ABK yang ada.¹² Demikian pula dalam suatu sekolah inklusif umumnya direkomendasikan maksimal hanya 2 kategori ABK. Hal ini agar dalam penyusunan kurikulum PPI dapat lebih fokus dan terstruktur. Terlalu banyak kategori ABK membuat strategi pembelajaran menjadi kurang efektif, karena kurang mengadopsi kebutuhan masing-masing kategori ABK.

Rekomendasi di atas kurang dapat diikuti di lapangan mengingat antara jumlah ABK yang ada di masyarakat belum sebanding dengan jumlah sekolah inklusif maupun SLB yang mampu menampung. Oleh sebab itu dalam keterbatasan tersebut, manajemen sekolah memberikan toleransi bagi masyarakat untuk sedapat mungkin menampung ABK yang ada agar jangan sampai ada ABK yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan. Konsekuensi dari keputusan tersebut, maka sekolah dituntut mengoptimalkan kinerja GPK dengan melibatkan strategi mitra belajar, dimana siswa reguler turut dilibatkan pula untuk membimbing teman-temannya para ABK.

Model Kurikulum

Menurut Permendiknas No 70 Tahun 2009,¹³ kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya. Dengan demikian setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat menerapkan kurikulum yang akomodatif di bawah standar nasional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk, dan MIN Cangkringan Kec. Pace, diketahui bahwa sekolah menerapkan kurikulum akomodatif di bawah standar nasional bagi siswa ABK. Kurikulum akomodatif tersebut disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus yang kemudian dikembangkan dalam standar kompetensi pada silabus dan RPP. Model penyesuaian kurikulum menggunakan kolaborasi antara model duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi.¹⁴

Model duplikasi adalah model kurikulum yang dirumuskan bagi ABK yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa reguler. Model duplikasi semacam ini diterapkan di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk dan MIN Cangkringan Kec. Pace pada pelajaran Pendidikan Jasmani, khususnya untuk ABK dengan kesulitan belajar. Hal ini dikarenakan materi Pendidikan Jasmani berfokus pada kegiatan olah raga yang dapat dilakukan oleh ABK bersama-sama dengan teman-temannya yang normal, tanpa memerlukan eksplorasi kognitif yang besar. Model duplikasi juga diterapkan pada siswa ABK tertentu di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan yang dianggap mampu mengikuti mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) seperti siswa normal lainnya, misalnya pada kegiatan

¹² Abdurrahman, Mulyono, ... 101

¹³ Kemendikbud. (2009). Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kemendikbud RI

¹⁴ Ainscow, Mand Booth, T....679

menggambar, menyanyi dan membuat prakarya sederhana. Model duplikasi juga diterapkan pada siswa ABK tertentu di MIN Cangkringan Kec. Pace untuk materi-materi tertentu pada pelajaran pendidikan agama Islam, misalnya belajar sholat dan menirukan bacaan ayat Al-Qur'an. Pada intinya model duplikasi dapat diterapkan pada semua mata pelajaran atau materi tertentu yang oleh guru dianggap dapat diikuti oleh ABK dengan standar siswa normal. Pemilihan materi-materi model duplikasi disesuaikan dengan hasil asesmen yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tim PPI sekolah yang bersangkutan.

Model modifikasi adalah model kurikulum untuk siswa ABK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Penerapan model modifikasi di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk dan MIN Cangkringan Kec. Pace banyak diterapkan pada mata pelajaran matematika dan IPA. Misalnya untuk siswa kelas 2 terdapat standar kompetensi matematika penjumlahan dan pengurangan sampai bilangan 500 dimodifikasi hanya sampai bilangan 20 untuk ABK kesulitan belajar dan autis. Sedangkan pada standar kompetensi IPA mengenal bagian-bagian hewan dan tumbuhan dimodifikasi hanya menyebutkan nama hewan dan tumbuhan tertentu yang tertera pada gambar.

Model substitusi adalah model kurikulum dimana ada beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara sesuai situasi dan kondisinya.¹⁵ Penerapan model modifikasi di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk dan MIN Cangkringan Kec. Pace umumnya diterapkan pada kompetensi-kompetensi berbicara dan berbahasa di kelas. Pada kegiatan berbicara, siswa ABK tidak dituntut dapat berbicara sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang baku dan benar, tetapi mereka cukup disubstitusi dengan kemampuan mengungkapkan pendapat atau perasaannya sesuai dengan caranya sendiri. Misalnya pada ABK autis, ketika membahas tentang puisi dapat disubstitusi dengan kegiatan mengungkapkan objek-objek indah seperti bulan, bintang, pelangi, dan sebagainya.

Model omisi adalah model kurikulum yang menghapus sebagian atau keseluruhan kurikulum untuk mata pelajaran tertentu, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata.¹⁶ Penerapan model omisi di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk dan MIN Cangkringan Kec. Pace umumnya diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan pendidikan komputer. Mata pelajaran Bahasa Inggris ditiadakan karena siswa ABK, khususnya siswa autis dianggap masih kesulitan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, terlebih lagi jika harus ditambah dengan beban pelajaran Bahasa Inggris. Oleh sebab itu pada saat pelajaran ini berlangsung, siswa autis diberi kegiatan lain, misalnya bermain puzzle, mewarnai gambar, maupun membuat prakarya sederhana.

¹⁵ Abdurrahman, Mulyono, ... *h.* 115

¹⁶ Chamidah, Atien Nur, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY, 2016), h. 234

Kompetensi Tenaga Pendidikan

Saat ini kompetensi ketenagaan pendidik di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Nganjuk masih sangat terbatas. Berdasarkan data ketenagaan di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk dan MIN Cangkringan Kec. Pace, seluruh GPK yang terlibat dalam pendidikan inklusif tidak ada yang berstatus lulusan Pendidikan Luar Biasa. Seluruhnya adalah guru reguler yang mendapat diklat PPI dari Dinas Dikpora atau Depag Kabupaten Nganjuk. Walaupun bukan lulusan PLB, namun para guru tersebut dituntut memiliki kecakapan untuk melakukan profesionalitas guru dan mampu mengembangkan proses pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus.

Berdasarkan keterangan beberapa orang guru kelas inklusi di SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk, diperoleh informasi bahwa idealnya kelas inklusi dilengkapi dengan guru lulusan PLB atau Sarjana Psikologi. Hal ini mengacu pada ketentuan baku bahwa syarat untuk menjadi GPK minimal harus lulusan PLB atau sarjana psikologi. Namun anggaran sekolah belum memungkinkan untuk mengadakan GPK baru dari lulusan PLB. Oleh sebab itu manajemen sekolah memutuskan tenaga guru pengajar inklusi diambil dari tenaga guru yang ada yang telah mendapat pembekalan diklat PPI dari Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan diklat PPI bagi guru sekolah inklusi sejak tahun 2012 - 2015 baru dilakukan 3 kali dengan durasi rata-rata 2 jam. Hal itu dianggap sangat kurang memadai bagi guru yang bersangkutan untuk memahami dan menerapkan program pembelajaran individual (PPI) bagi ABK di sekolah inklusi. Guru merasa kurang percaya diri dalam memberikan materi dan metode pembelajaran bagi ABK karena takut keliru atau kurang tepat sasaran.

Permasalahan diklat PPI yang cukup menonjol ditemukan pada guru-guru GPK di MIN Cangkringan Kec. Pace. Diklat PPI yang dilaksanakan tidak terkoordinasi dengan Dinas Dikpora, namun dilaksanakan secara mandiri oleh Depag. Menurut keterangan beberapa guru GPK di MIN Cangkringan Kec. Pace, sistem pelaksanaan diklat PPI dari Depag masih kurang terstruktur, karena petugas pelaksana belum memiliki pemahaman yang tepat tentang konsep pendidikan inklusif. Hal ini menyebabkan pelaksanaan diklat terkesan hanya formalitas, materi diklat kurang aplikatif dan kurang mampu menjawab permasalahan di lapangan. Secara umum diklat PPI yang diberikan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi guru-guru GPK. Sebaliknya mereka akhirnya secara kreatif dan mandiri mencari informasi tentang pelaksanaan PPI dari sumber-sumber lain di luar diklat yang diselenggarakan dari depag.¹⁷

Persoalan efektivitas pelaksanaan PPI di sekolah inklusif juga tidak terlepas dari persoalan anggaran. Menurut keterangan Kepala SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk,

¹⁷ Hajar, Ibnu. (2015). Pendidikan Inklusif: Sebuah Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus. Disampaikan pada Diklat Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Nganjuk. Tanggal 17-21 Februari 2015

alokasi anggaran untuk pelaksanaan PPI di sekolah inklusi saat ini belum ada, karena belum diterbitkan SK dari Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk tentang alokasi dana BOS untuk pelaksanaan PPI di sekolah inklusi. Manajemen sekolah inklusi dituntut secara mandiri mengelola dana BOS yang ada saat ini untuk keperluan fasilitas belajar mengajar siswa ABK dan peningkatan kualitas guru pengajar, walaupun jumlahnya masih jauh dari target yang diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan penataan sistem ketenagaan guru PPI oleh Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk menjadi lebih jelas dan proporsional. Hal itu tentu tidak lepas dari pemenuhan anggaran dari dana APBD yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas SDM guru yang ditunjuk untuk menangani ABK di sekolah inklusif.¹⁸

Kegiatan Pembelajaran

Implementasi Program Pembelajaran Individual (PPI) diawali dari dari perencanaan kegiatan belajar yang disusun dalam Format PPI oleh guru GPK. Kegiatan belajar pada Format PPI terdiri dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup pembelajaran. Dalam Format PPI tersebut, tercermin kurikulum inklusif yang dipilih bagi ABK, apakah kurikulum bersifat duplikasi, modifikasi, substitusi, ataukah omisi. Dalam satu tahun pelajaran pelaksanaan program pembelajaran individual (PPI) dibagi dalam 3 periode catur wulan. Setiap akhir periode dilakukan evaluasi apakah kegiatan pembelajaran selama periode tersebut telah mencapai target hasil yang direncanakan dalam format PPI.¹⁹

Salah satu contoh kegiatan belajar di sekolah inklusif dicerminkan dari hasil wawancara dengan salah satu guru kelas inklusi yang menangani seorang ABK berkesulitan belajar yang bernama Rasman (bukan nama sebenarnya) di kelas 5 SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk. Adapun berdasarkan hasil asesmen, diketahui Rasman mengidap tunagrahita ringan sehingga tidak mampu mengikuti pelajaran-pelajaran dasar sesuai anak normal seusianya. Pada aspek akademik, diketahui Rasman pernah tidak naik kelas 1 kali, belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, dan tidak mampu berkomunikasi dengan tata bahasa yang baik dan jelas. Oleh sebab itu dalam format PPI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi Rasman dirumuskan strategi modifikasi. Misalnya standar kompetensi normal siswa kelas 5 SD yaitu membaca teks puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, maka standar kompetensi untuk Rasman diturunkan levelnya menjadi membaca kartu huruf "a" sampai "z" dengan benar.²⁰

Guna mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar dengan siswa ABK, maka strategi yang sering diterapkan oleh guru di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk dan MIN Cangkringan Kec. Pace adalah strategi

¹⁸Chamidah, Atien Nur,h.. 78

¹⁹ Hajar, Ibnu. (2015). Pendidikan Inklusif: Sebuah Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus. Disampaikan pada Diklat Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Nganjuk. Tanggal 17-21 Februari 2015

²⁰ Tarmansyah, *Inklusif Pendidikan untuk Semua*. (Jakarta: Depdiknas,2017), h. 67

mitra belajar. Melalui strategi ini, guru menunjuk beberapa siswa reguler untuk terlibat dalam kegiatan bimbingan bagi temannya yang berstatus ABK. Siswa reguler tersebut umumnya diambil dari kalangan siswa yang berprestasi, memiliki karakter yang baik dan dibekali terlebih dahulu cara-cara membimbing ABK. Pelaksanaan mitra belajar bersifat fleksibel, bisa dilakukan di dalam kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung atau bisa juga dilakukan pada jam istirahat serta sehabis pulang sekolah. Strategi ini selain bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan ABK, juga menumbuhkan sikap kebersamaan dan kesetaraan yang merupakan tujuan awal dari pendidikan inklusif itu sendiri.²¹

Selanjutnya guna menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar ABK pada sekolah inklusi, maka manajemen sekolah melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi yang diinisiasi oleh Kepala Sekolah setempat. Kegiatan monitoring dan supervisi di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan diwujudkan dengan meninjau kelas secara langsung sesuai jadwal dan mengevaluasi pelaksanaan format PPI oleh GPK. Jika ditemukan adanya kendala di lapangan, maka dilakukan komunikasi umpan balik dengan GPK dan dirumuskan strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Kegiatan monitoring dan supervisi di SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk juga diinisiasi oleh Kepala Sekolah melalui proposal dan laporan PPI dari GPK tentang hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran pembelajaran ABK di kelas. Setiap GPK dapat mengajukan rincian anggaran kebutuhan sarana belajar, misalnya peta timbul dan penggaris pembesar untuk ABK tunagrahita, *hearing aid* dan *speech trainer* untuk ABK tunarungu, serta puzzle dan ular tangga lingkungan bagi ABK tunagrahita. Sedangkan kegiatan monitoring dan supervisi di MIN Cangkringan Kec. Pace belum berjalan secara efektif dan maksimal, dikarenakan belum ada komunikasi dan koordinasi dengan para *stakeholder* di Kemenag Kabupaten Nganjuk. GPK maupun Kepala Sekolah tidak memiliki pedoman evaluasi kegiatan belajar mengajar ABK sesuai standar tertentu.

Walaupun secara umum pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Nganjuk baru diujicobakan pada tahun 2012 dan baru terlaksana resmi pada tahun 2013, namun sudah dapat dilihat output dari pelaksanaan tersebut. Menurut keterangan GPK di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan dan di SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk, sudah ada masing-masing 1 ABK angkatan tahun 2013 yang lulus dan diterima di jenjang SMP reguler. Hal ini menunjuk keberhasilan GPK pada dua sekolah tersebut dalam mengupayakan peningkatan pengetahuan ABK di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan di MIN Cangkringan Kec. Pace masih belum ada ABK yang lulus.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran terhadap

²¹ Stubbs, Sue. *Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*. Bandung: UPI Press, 2015

ABK di SDN Wilangan 1 Kec. Wilangan, di SDN Werungotok 2 Kec. Nganjuk, dan di MIN Cangkringan Kec. Pace dengan model kurikulum meliputi model duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi. Temuan lain, seluruh guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif hanya guru reguler yang telah mendapat (pelaksanaan pendidikan inklusi (PPI) dari Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Mulyono. *Pendidikan Bagi Anak Bangsa Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ainscow, Mand Booth, T. *Index for Inclusion Developing Learning and Participation in Schools*. Hobboken: CSIE Mark Vaughan, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera. 1989.
- Assjari, Musjafak. *Program Pembelajaran Individual*. Departemen Pendidikan Nasional. 2005
- Chamidah, Atien Nur. *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2010
- Hajar, Ibnu. *Pendidikan Inklusif: Sebuah Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus*. Disampaikan pada Diklat Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Nganjuk. Tanggal 17-21 Februari 2015.
- Jamaris, Martini. *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman. Kanak-kanak*. Jakarta: Gramedia. (2006)
- Kekeh, Marthan Lay. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN. DIKTI. 2007.
- Kemendikbud. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal *Pendidikan Inklusif*. Kemendikbud RI.
- Kemendikbud. Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Kemendikbud RI.
- Kwon, Hyunjong. "Bottle Cultivation". *Handbook for Mushroom Grower 1: Oyster Mushroom Cultivation*. MushWorld. 2004
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Roesdakarya, 2010
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka. Cipta, 2011
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru*

pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah, dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2011.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara. Wacana, 2006.

Stubbs, Sue. *Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*. Bandung: UPI Press, 2002

Tarmansyah. *Inklusif Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas, 2007

Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Fourth Edition. Sage Publication, 2009